

# Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Demokratisasi Irak Melalui Program USAID 2021

Fanessa Syailirrahmah Mahfud, Teuku Rezasyah

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

e-mail : syailirrahma@gmail.com

## Abstract

*Since 2003, the United States has focused its foreign policy on Iraq to democratize and create peace. However, until 2021, Iraq has yet to become a democratic country and remains a conflict-ridden region. In an effort to democratize Iraq, US provides assistance to the country, through the United States Agency for International Development (USAID). The findings of this research indicate that the US government's agenda in Iraq has experienced failures, evident, for example, in the 2021 general elections where Iraq still faced a political crisis and numerous human rights violations. Additionally, corruption and armed conflicts continue to occur in Iraq. It can be concluded that Iraq has not yet become a democratic country. It was found that the reasons behind this situation include human rights abuses and coercion by the United States itself in its efforts to spread liberal democracy.*

**Keywords:** *democratization, Foreign Policy Analysis, Iraq, United States, USAID.*

## Abstrak

Sejak tahun 2003, Amerika Serikat memfokuskan kebijakan luar negerinya di Irak untuk mendemokratisasi dan menciptakan perdamaian. Namun hingga tahun 2021, Irak belum juga menjadi negara yang demokratis dan masih menjadi kawasan penuh konflik. Dalam upaya mendemokratisasi Irak, AS memberikan bantuan kepada negara tersebut, antara lain melalui *United States Agency for International Development* (USAID). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa agenda pemerintah Amerika Serikat di Irak mengalami kegagalan, antara lain indikasinya adalah pada saat pemilihan umum tahun 2021, Irak masih dilanda krisis politik dan masih banyak pelanggaran HAM. Selain itu, korupsi dan konflik

bersenjata juga masih terjadi di Irak. Dapat disimpulkan bahwa Irak belum menjadi negara yang demokratis. Ditemukan bahwa penyebab kondisi ini adalah adanya pelanggaran HAM dan koersi dari Amerika Serikat sendiri dalam upayanya menyebarkan demokrasi liberal.

**Kata kunci:** Analisis Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, demokratisasi, Irak, USAID.

## Pendahuluan

Peristiwa 11 September 2001 merupakan titik awal perubahan lingkungan politik Timur Tengah secara dramatis. Serangan 9/11 yang terjadi di *World Trade Center* (WTC) pada akhirnya membuat pemerintah Amerika Serikat, khususnya pada saat itu Presiden George W. Bush, menjadikan Timur Tengah sebagai fokus utama kebijakan luar negerinya (Bush, *Peace in the Middle East*, 2008). Pemerintah Amerika Serikat menjanjikan Irak untuk menjadi negara demokratis. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 2002, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin Powell, pertama kali mengumumkan rencana untuk demokratisasi di Irak (Powell, 2002).

Kemudian, pada tahun 2002 hingga awal 2003, muncul kecurigaan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap Irak yang memiliki *Weapon of Mass Destruction* (WMD) serta pemerintah Amerika Serikat pada saat itu mengumumkan betapa bahayanya rezim Saddam Hussein, yang pada akhirnya menggiring pemerintah Amerika Serikat berupaya melakukan operasi militer untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dari kekuasaannya pada 19 Maret 2003, hingga tercatat ada 208.800 kematian warga sipil sejak invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 hingga 2021 (IBC, 2021). Pemerintah Amerika Serikat pada saat itu melakukan operasi militer dengan nama *Global War on Terror* (GWOT) yang mana program ini memiliki tujuan untuk memerangi aksi teroris, dan berujung kepada Perang Irak (GwbushLibrary, 2003). Hingga pada tahun 2004, *Iraq Survey Group* (ISG) memberikan laporan akhir bahwa tidak ditemukan *Weapon of Mass Destruction* (WMD) di Irak setelah terjadinya banyak konflik dan korban yang diakibatkan misi pemberantasan terorisme tersebut.

Salah satu program dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak ialah *United States Agency International Development* (USAID). Mulai dari tahun 2003 pada masa kepemimpinan George W. Bush, awal dimana Amerika Serikat memutuskan untuk membantu Irak untuk menjadi negara yang demokratis, USAID telah menjadi kontributor utama dalam memberikan bantuan berupa pendanaan. Kemudian pada tahun 2009, disaat pemerintah Amerika Serikat telah

berganti kepemimpinan oleh Barack Obama dan memutuskan untuk meninggalkan Irak, USAID menuntun Irak agar dapat merekonstruksi dan mengatur negaranya sendiri secara efektif. Walaupun pemerintah Amerika Serikat sudah memutuskan untuk menarik pasukannya dari Irak secara resmi pada tahun 2010, USAID hingga tahun 2021 di masa kepemimpinan Joe Biden, terus mendukung tujuan *Strategic Framework Agreement* (SFA) dengan pemerintah Irak. Tujuan jangka panjang utama USAID dalam mendukung tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ialah untuk Irak tetap menjadi negara yang demokratis (USAID, History of USAID, 2021).

Berkaitan dengan demokratisasi Irak, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas demokratisasi Irak untuk menjadikan Irak menjadi negara yang demokratis, yaitu; (Saputra, 2011), (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013), (Machlis, 2021), (Hatif, 2021), (Rahbarqazi & Mahmoudoghli, 2020), (Souli, 2019), dan (Alkifaey, 2019). Sebagaimana yang termaktub pada penelitian tersebut diatas, peneliti menemukan bahwa penelitian-penelitian terdahulu ini membahas pihak internal yang mempengaruhi demokratisasi Irak. Melalui penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan mencoba pembaharuan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan membahas keterkaitan pihak eksternal dalam demokratisasi Irak, yang mana dalam hal ini pihak eksternal yang mempengaruhi demokratisasi Irak tersebut adalah pihak Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat inilah yang memutuskan untuk memfokuskan kebijakan luar negerinya terhadap Irak agar Irak dapat menjadi negara yang demokratis.

Penting untuk mendalami dan menganalisis peran Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak. Penelitian sebelumnya tentang demokratisasi di Irak dipengaruhi oleh pihak internal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif yang digunakan, peneliti akan menganalisis berdasarkan sumber-sumber yang diambil melalui artikel berita, jurnal, maupun dokumen resmi dari kedua belah pihak, baik Amerika Serikat maupun Irak yang berhubungan dengan Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Demokratisasi Irak melalui Program *The United States Agency for International Development* (USAID) 2021.

### **Analisis Kebijakan Luar Negeri**

Analisis kebijakan luar negeri merupakan studi untuk memahami perilaku aktor dan praktik hubungan antar aktor, terutama negara, dalam sistem internasional. Analisis kebijakan luar negeri perlu digunakan untuk memahami pentingnya pengambilan keputusan kebijakan luar negeri bagi suatu negara, mengetahui pengaruh apa saja yang dapat membentuk kebijakan luar negeri, dan juga dapat mengetahui perilaku suatu

negara dalam urusan internasional. Bahkan, analisis kebijakan luar negeri dapat meningkatkan kemungkinan negara mencapai hasil yang lebih baik bahkan dapat meningkatkan kemungkinan hubungan damai suatu negara (Alden & Aran, 2017:3).

Analisis kebijakan luar negeri penting untuk memahami lebih dalam atas kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Graham T. Allison (1971) dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* membuat tiga model untuk menganalisis kebijakan luar negeri, yaitu Model Aktor Rasional, Proses Organisasi, dan Birokratik Politik.

Pendekatan analisis kebijakan luar negeri yang paling banyak digunakan adalah Model Aktor Rasional. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa aktor utama dalam kebijakan luar negeri adalah individu rasional yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang dapat memaksimalkan nilai dan manfaat yang akan dirasakan oleh negara. Dalam Model Aktor Rasional, aktor yang membuat keputusan bisa dari pemerintah negara itu sendiri. Pemerintah negara dapat mengambil keputusan dan keputusan ini akan bersifat konsisten selama masa jabatannya. Pendekatan dalam Model Aktor Rasional dapat berguna untuk memahami tujuan atau motif di balik tindakan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kebijakan luar negeri dan mengacu pada Model I yaitu Model Aktor Rasional untuk dapat memahami tujuan atau motif di balik kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Irak.

Penjelasan Model Aktor Rasional dalam analisis kebijakan luar negeri membuat peneliti ingin mendalami tujuan atau motif di balik pemerintah Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negerinya di Irak. Pembuat kebijakan dalam Model Aktor Rasional ini merupakan aktor nasional atau pemerintah negara itu sendiri. Aktor dalam Model Aktor Rasional ini memiliki tujuan tertentu dari kebijakan luar negeri yang dibuat. Dalam Model Aktor Rasional, peristiwa dalam urusan luar negeri dipahami sebagai tindakan yang dipilih oleh pemerintah negara itu sendiri. Pemerintah negara memilih tindakan yang akan memaksimalkan tujuan dan sasaran strategis negaranya (Allison, 1971, p. 32).

## **Demokrasi**

Joseph Schumpeter (1950) mendefinisikan demokrasi sebagai metode atau pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuatan untuk memutuskan suara rakyat melalui perjuangan yang kompetitif (Schumpeter, 1950:269). Rakyat menurut Schumpeter, memiliki kekuatan

untuk memutuskan suatu keputusan di negara dimana ia berada. Peran rakyat dalam demokrasi adalah untuk menghasilkan pemerintah atau parlemen yang pada gilirannya akan menghasilkan pemerintah nasional.

Demokrasi dalam pengertian Robert A. Dahl (1998) dapat memberikan kesempatan untuk; *Pertama*, partisipasi efektif, di mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai kebijakan yang akan dibuat dan diketahui oleh anggota lain. *Kedua*, kesetaraan dalam *voting*, di mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memilih keputusan mengenai kebijakan yang akan dibuat, dan semua suara harus dihitung sama. *Ketiga*, mendapatkan pemahaman yang tercerahkan, di mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk belajar atau mendalami kebijakan yang relevan dan kemungkinan konsekuensinya. *Keempat*, menjalani kontrol atas agenda, di mana semua anggota memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana jika mereka memilih hal-hal apa saja yang akan dimasukkan ke dalam agenda. *Kelima*, inklusi penduduk dewasa, penduduk tetap yang sudah dewasa atau cukup umur, memiliki hak penuh sebagai warga negara yang tersirat dalam empat kriteria pertama, dengan tujuan kesetaraan politik dalam suatu negara (Dahl, 1998:37-38).

Dalam pandangan Dahl (1998) demokrasi memiliki manfaat, setidaknya ada sejumlah manfaat, antara lain, *pertama*, demokrasi membantu mencegah pemerintahan yang kejam atau diktator. Dahl percaya bahwa demokrasi dapat cenderung lebih adil dan lebih menghormati kepentingan dasar rakyat daripada non-demokrasi (Dahl, 1998:48). *Kedua*, demokrasi menjamin rakyatnya sejumlah hak-hak dasar yang sistem non-demokrasi tidak bisa berikan. Hak rakyat merupakan elemen penting dalam institusi politik yang demokrasi, karena demokrasi, bukan hanya sekedar memerintah, namun memberikan hak bebas terhadap rakyatnya (Dahl, 1998:48). *Ketiga*, demokrasi menjamin rakyatnya kebebasan pribadi. Setiap individu berhak untuk memiliki kebebasan pribadi. Dan untuk pemerintahan menjadi demokratis, perlu memberikan rakyatnya kebebasan yang luas, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lain-lain (Dahl, 1998:50). *Keempat*, demokrasi membantu rakyat dalam melindungi kepentingan fundamental mereka sendiri. Setiap individu memiliki keinginan dan kepentingan masing-masing dalam menentukan hidupnya sendiri. Dengan demokrasi, kepentingan fundamental rakyat dilindungi (Dahl, 1998:52).

*Kelima*, pemerintahan demokratis dapat memberikan kesempatan terhadap rakyatnya untuk menjalankan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri. Sudah seharusnya tiap individu dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa harus dibatasi oleh pemerintahan yang non-demokratis. Pemerintahan demokratis memberikan

kesempatan rakyatnya untuk bebas dalam menentukan nasibnya sendiri (Dahl, 1998:53). *Keenam*, pemerintah demokratis dapat memberikan kesempatan terhadap rakyatnya untuk melaksanakan tanggung jawab moral. Pemerintah yang demokratis akan memberikan kesempatan sepenuhnya terhadap rakyatnya untuk hidup di bawah hukumnya sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihannya (Dahl, 1998:55). *Ketujuh*, negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih sejahtera daripada negara-negara dengan pemerintahan yang non-demokratis (Dahl, 1998:58).

Pemahaman mengenai demokrasi dalam penelitian ini memberikan landasan bagi peneliti untuk memahami apakah demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat benar menjadikan Irak menjadi negara yang demokratis atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada dinamika politik di Irak. Pemahaman mengenai demokrasi juga dapat membantu peneliti untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak dalam mewujudkan negara yang demokratis di Irak dalam pengertian demokrasi oleh Robert A. Dahl (1998).

### **Latar Belakang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Irak**

Kejadian pertama yang pada akhirnya membuat pemerintahan Amerika Serikat memutuskan untuk memfokuskan kebijakan luar negerinya di Irak adalah Serangan 11 September 2001 atau sering disebut 9/11. Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, yang dilantik pada 20 Januari 2001, menyadari bahwa ia masih belum memfokuskan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah (GwbushLibrary, 2003). Sebagai aktor rasional, pemerintah Amerika Serikat memilih tindakan untuk memfokuskan kebijakan luar negerinya di Irak atas dasar keamanan dan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Kejadian 9/11 yang membuat pemerintah Amerika Serikat memiliki keinginan untuk memberantas kelompok teroris, juga membawa pemerintah Amerika Serikat menggulingkan rezim Saddam Hussein di Irak. Hal ini lah yang semakin membawa Amerika Serikat masuk ke dalam urusan lingkungan politik di Irak. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat melakukan *Global War on Terror* (GWOT) untuk memerangi aksi teroris, yang ujungnya membuat terjadinya invasi atau perang Irak pada 2003 (GwbushLibrary, 2003). Sekretaris Jenderal PBB pada saat dilaksanakannya *Global War on Terror* (GWOT) oleh Amerika Serikat, Kofi Annan, mengatakan bahwa invasi dari Amerika Serikat ke Irak adalah tindakan ilegal yang bertentangan dengan *UN Charter*. Kofi Annan juga mengatakan bahwa keputusan tersebut seharusnya dibuat oleh *Security Council*, bukan secara sepihak (BBC, 2004).

Keinginan Amerika Serikat dalam memberantas terorisme kemudian berlanjut pada meningkatkan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Irak dengan menggulingkan rezim Saddam Hussein. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh presiden George W. Bush, bahwa ia merasa prihatin melihat Irak berada di bawah rezim Saddam Hussein, hingga presiden George W. Bush mendeskripsikan Saddam Hussein sebagai seorang pria yang rela membunuh rakyatnya sendiri dengan menggunakan *Weapon of Mass Destruction* (WMD), seorang pria yang memiliki suatu niat yang dirahasiakan, bahkan presiden George W. Bush mengatakan bahwa Saddam Hussein merupakan sebuah masalah, dan Amerika Serikat perlu menghancurkannya (GWBushArchives, 2002).

Invasi Amerika Serikat ke Irak, oleh sebagian pengamat, disebut berhasil dari sisi bahwa rezim Saddam Hussein yang diktator dan otoriter telah ditumbangkan dan rakyat Irak meraih kebebasan mereka. Namun, aspek keberhasilan ini disertai dengan kegagalan dalam menghentikan konflik, penjarahan, serta kerusakan infrastruktur yang terjadi di Irak setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Bush gagal mengantisipasi hal yang kiranya akan terjadi akibat dari jatuhnya rezim Saddam Hussein. Dampak yang dirasakan oleh rakyat Irak adalah banyaknya korban jiwa, dimana 12.512 warga sipil Irak yang menjadi korban jiwa dari adanya operasi militer ke Irak oleh Amerika Serikat (Statista, 2023). Selain itu, terjadi disintegrasi serta perpecahan yang mengarah pada konflik sektarian di Irak. Sementara itu, dampak bagi para aktor internasional, terutama bagi negara-negara tetangga Irak, adalah ketidakstabilan di kawasan, antara lain karena terjadinya konflik, terganggunya kerja sama ekonomi, dan meningkatnya arus pengungsi. Sementara, bagi Amerika Serikat sendiri, peningkatan aksi-aksi terorisme pascakejatuhan Saddam menimbulkan ancaman terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat dan keamanan rakyat Amerika Serikat (Gov, 2006).

Alasan utama yang diberikan pemerintah Amerika Serikat untuk memulai serangan ke Irak pada tanggal 19 Maret 2003 adalah adanya *Weapon of Mass Destruction* (WMD) (GwbushLibrary, 2003). Namun tuduhan dari pemerintah Amerika Serikat ini akhirnya terbantahkan pada tahun 2004, terbukti dalam laporan akhir dari Iraq Survey Group (ISG). Pada kesimpulannya *Iraq Survey Group* (ISG) tidak menemukan *Weapon of Mass Destruction* (WMD) di Irak (Duelfer, 2004). Laporan *Iraq Survey Group* (ISG) ini merupakan hasil dari ratusan individu yang berpartisipasi dalam upaya mencari fakta; seperti tentara, analis, dan supporter yang berasal dari Australia, Inggris, dan juga Amerika. Mereka berusaha untuk memahami peran *Weapon of Mass Destruction* (WMD) di Irak selama dekade terakhir atau lebih. Juga, misi ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang serempak ingin mencari kenyataan dan

mengembangkan kebijakan untuk mengurangi penderitaan dan menghindari konflik (Duelfer, 2004:1).

Hasil dari temuan pertama *Iraq Survey Group* (ISG) ialah total terdapat 53 amunisi *Weapon of Mass Destruction* (WMD) dari unit militer yang merupakan bagian dari sisa persediaan pada perang Teluk pra-1991, berdasarkan kondisi fisik dan komponen sisa (GlobalSecurity, 2004). Saddam Hussein telah mengakhiri program nuklir di tahun 1991 setelah perang Teluk berakhir, pada saat itu juga *Weapon of Mass Destruction* (WMD) yang dimiliki oleh Irak tidak pernah digunakan lagi. *Iraq Survey Group* (ISG) juga melaporkan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang menunjukkan upaya dari Irak untuk memulai kembali program nuklir atau tidak ada upaya untuk membuat *Weapon of Mass Destruction* (WMD) kembali (Duelfer, 2004:1).

*Iraq Survey Group* (ISG) menegaskan bahwa Irak telah menghancurkan persediaan *Weapon of Mass Destruction* (WMD) di tahun 1991 tersebut. *Iraq Survey Group* (ISG) juga menyimpulkan bahwa hal yang beredar pada saat itu yang kemudian membuat pemerintah Amerika Serikat masuk ke Irak lalu memulai perang Irak dengan tujuan untuk memerangi aksi teroris Irak yang dianggap memiliki *Weapon of Mass Destruction* (WMD) itu bertentangan dengan fakta yang ada (Duelfer, 2004).

Dengan tidak adanya bukti bahwa Irak memiliki *Weapon of Mass Destruction* (WMD) dan penggulingan rezim Saddam Hussein, dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan pada saat itu memiliki motif lain. George W. Bush sendiri pun mengakui bahwa Irak tidak memiliki *Weapon of Mass Destruction* (WMD) dan Irak tidak ada kaitannya dengan kejadian 9/11 (Bush, President Bush Admits Iraq Had No WMDs and 'Nothing' to Do With 9/11, 2006). Sesuai juga dengan apa yang diasumsikan oleh Graham T. Allison (1971) bahwa kebijakan yang diambil oleh suatu negara tentu dilatarbelakangi oleh suatu tujuan atau kepentingan negaranya. Dengan memahami kebijakan yang diambil pada saat kepemimpinan George W. Bush, dapat dipahami bahwa pemerintah Amerika Serikat pada saat itu ingin menguasai Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat juga berkeinginan menjadi negara yang memiliki kekuatan utama di dunia. Hal itu tersirat dari pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada saat itu, Donald Rumsfeld, bahwa penggulingan rezim Saddam Hussein akan meningkatkan kredibilitas dan pengaruh Amerika Serikat di seluruh kawasan dan dapat menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah segalanya (NSA, 2010).

Setelah hampir enam tahun menduduki Irak, tepatnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, terjadilah pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat, dari George W. Bush kepada Presiden Barack Obama. Di bawah kepemimpinan Obama, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk meninggalkan Irak pada akhir tahun

2011. Menurut Obama, konflik yang terjadi sudah terlalu lama dan sudah banyak menelan korban jiwa. Keberadaan Amerika Serikat di Irak juga telah menimbulkan konflik antara sektarian dan jihadis, yang terjadi akibat kehadiran Amerika Serikat. Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membuat strategi baru, antara lain menyerahkan tanggung jawab penuh ke Irak. Tujuan adalah agar Irak menjadi negara yang berdaulat, stabil, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Amerika Serikat berkomitmen untuk tetap membantu Irak sampai benar benar bisa menjadi negara yang berdiri sendiri setelah Amerika Serikat pergi meninggalkan Irak. Obama berharap kepergian Amerika Serikat dari Irak akan menandai era baru kepemimpinan dan keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah dan mengubah cara dunia memandang Amerika Serikat (Obama, Remarks of President Barack Obama - Responsibly Ending the War in Iraq, 2009).

Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2010, Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa hampir 100.000 pasukan tentara Amerika Serikat telah pindah dari Irak. Amerika Serikat juga telah menutup atau memindahkan ratusan pangkalan di Irak dan juga telah memindahkan jutaan peralatan dari Irak. Obama mengumumkan berakhirnya misi tempur di Irak dan transisi tanggung jawab keamanan Irak kepada pemerintah Irak sendiri. Lalu, pada 18 Desember 2011, pasukan tentara Amerika Serikat yang terakhir telah dipulangkan dari Irak dan secara resmi Amerika Serikat mengakhiri keterlibatan militer Amerika selama delapan tahun di Irak (Obama, Promise Kept, 2011).

Namun kemudian perkembangan baru terjadi. Pada tahun 2013, *Islamic States of Iraq and Syria* (ISIS) terbentuk. Berbagai kekerasan kembali terjadi di Irak. Pada tahun itu, jatuh korban sebanyak 200 warga sipil yang tewas dan setidaknya 150 warga sipil yang terluka akibat serangan ISIS. Lalu, pada Juni 2014, ISIS berhasil merebut beberapa wilayah di Irak (Hamasaheed & Nada, 2020). Kebangkitan ISIS dan adanya video yang menunjukkan pemenggalan dua jurnalis dari Amerika Serikat, yaitu Jim Foley dan Steven Sotloff, mendorong Obama untuk bertindak melawan ISIS. Obama mengatakan bahwa ISIS merupakan ancaman bagi rakyat Irak dan Suriah, dan Timur Tengah, termasuk juga warga negara dan fasilitas Amerika Serikat. Jika ISIS dibiarkan, akan menimbulkan kemungkinan ISIS dapat menjadi ancaman pada Amerika Serikat (Obama, Statement by the President on ISIL, 2014).

Pada tahun 2014, pemerintah Amerika Serikat kembali melakukan operasi militer di Irak dengan membentuk koalisi global untuk menumpas *Islamic States of Iraq and Syria* (ISIS). Koalisi global ini beranggotakan 83 negara (Gov S. , 2021). Dalam operasi penumpasan ISIS ini juga melibatkan militer Irak, rakyat Irak yang tergabung dalam *The People's Mobilization Forces* (PMF) yang dibentuk oleh pemerintah Irak dan mendapatkan bantuan dari Iran serta milisi Kurdi. Akhirnya, pada bulan Desember 2017,

Perdana Menteri Irak, Haider al Abadi mengumumkan bahwa Irak telah menang melawan ISIS (Husain, 2023).

Meskipun ISIS sudah dikalahkan, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James N. Mattis, mengatakan bahwa militer Amerika Serikat akan terus melawan ISIS dan membuat kebijakan luar negeri dengan tujuan jangka panjang di Irak untuk mencegah kembalinya ISIS (Nelson, 2023).

### ***United States Agency for International Development (USAID) dalam Demokratisasi Irak***

Mulai tahun 2020, kepemimpinan di Amerika Serikat kembali berubah dengan menangnya Joe Biden dalam pemilu kepresidenan. Pada 26 Juli 2021, Biden secara resmi membuat pernyataan bahwa Amerika Serikat telah menyelesaikan misi tempurnya di Irak pada akhir 2021. Biden mengatakan bahwa peran Amerika Serikat di Irak akan bersedia untuk terus membantu, melatih, dan menangani ISIS dan Amerika Serikat akan terus mendukung penguatan demokrasi Irak dan Amerika Serikat memastikan pemilu dilanjutkan pada bulan Oktober 2021. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Irak terus untuk membantu Irak menjadi negara yang demokratis (Liptak & Vazquez, 2021).

Pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development* (USAID), mendukung pemerintah Irak dan masyarakat sipil Irak dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis. USAID memberikan \$172 juta dari 2017-2023 untuk Irak sebagai dukungan terhadap Irak dalam meningkatkan manajemen sumber daya, memberdayakan kepemimpinan, dan peningkatan layanan untuk seluruh masyarakat Irak (USAID, Democracy & Governance, 2021). Jika manajemen sumber daya meningkat, pemimpin berdaya, dan peningkatan layanan yang bagus dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Irak, Irak dapat menjadi negara yang demokratis, karena untuk menjadi negara yang demokratis, negara dengan pemerintahan yang demokratis akan lebih sejahtera dibandingkan negara dengan pemerintahan yang non-demokratis.

*United States Agency for International Development* (USAID) juga mendukung demokrasi Irak dengan menginvestasikan \$25,4 juta selama lima tahun dari 2018-2023 dengan tujuan untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan adil, sebab pemilu yang transparan dan adil merupakan hal yang penting bagi negara demokratis. USAID juga mendukung proses pemilu Irak dengan membangun kapasitas *Independent High Electoral Commission* (IHEC) yang merupakan komisi pemilihan di Irak. USAID juga memberikan \$9,7 juta kepada *United Nations Assistance Mission for Iraq's* (UNAMI)

dalam kegiatan mendukung pemilu terhadap pemerintah Irak dan masyarakat Irak agar terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil, serta meningkatkan jumlah pemilih dalam proses pemilu. USAID juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemilu yang mana dalam hal ini, USAID memang benar mendorong negara Irak agar menjadi negara yang demokratis (USAID, Democracy & Governance, 2021).

Pada realitasnya, *Independent High Electoral Commission* (IHEC) memang bertanggung jawab dalam mengelola pemilu di Irak. IHEC mendapatkan kepercayaan dari masyarakat internasional untuk mengelola pemilu di Irak. IHEC juga bertanggung jawab dengan mendaftarkan partai untuk pemilu. Dalam praktiknya, masyarakat Irak dapat membentuk partai tanpa campur tangan pemerintah Irak sejak tahun 2018. Tiap partai pada politik Irak didominasi oleh satu kelompok sektarian atau etnis yang sama (FreedomHouse, 2021). Yang mana artinya Irak hingga pemilu pada 2021, gagal menjadi negara yang demokratis sebab pemerintah demokratis seharusnya dapat mendorong tingkat kesetaraan politik, pada kenyataannya hingga pemilu 2021, tingkat kesetaraan politik masih belum ditemukan di Irak.

Mengingat dalam strategi *Democracy, Human Rights, and Governance* (DRG) yang ada di *United States Agency for International Development* (USAID), USAID menawarkan 7 hal kepada Irak, yaitu pemerintahan yang demokratis; partisipasi dan inklusi; pemilu yang bebas dan adil, transparan, dan akuntabilitas; masyarakat sipil dan media independent; keadilan dan keamanan; HAM dan nondiskriminasi; serta melawan pengaruh otoriter. Pada poin partisipasi dan inklusi, USAID dapat dikatakan berhasil membuat masyarakat Irak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memiliki suara untuk memilih.

Namun pada enam poin yang lain, dapat dikatakan gagal sebab enam poin lainnya masih belum berhasil ditemukan di Irak. Misalnya, tingkat korupsi yang masih tinggi, sistem peradilan di Irak masih belum berfungsi sempurna yang mengakibatkan korupsi terus melanda Irak dan menghambat kesejahteraan di Irak. Kebebasan berekspresi juga masih belum ditemukan di Irak, antara lain terlihat dalam kejadian 20 Januari 2020 di mana pasukan keamanan Irak menembaki pengunjuk rasa di Tahrir Square, Baghdad. Pasukan keamanan Irak juga menembak, menangkap, dan menculik wartawan yang meliput unjuk rasa anti pemerintah di Irak. Lalu, Irak juga masih belum menjamin kebebasan keyakinan masyarakatnya, sebab tempat ibadah masih menjadi sasaran serangan teroris di Irak (FreedomHouse, 2021). Media di Irak hingga tahun 2021 masih belum bisa bebas meliput apapun yang terjadi di negerinya selama liputannya bertentangan dengan keinginan pemerintah (HRW, 2021).

### Analisis Penyebab Kegagalan Amerika Serikat dalam Proyek Demokratisasi Irak

Salah satu tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Irak adalah melakukan demokratisasi di negara tersebut. Namun, selama lebih dari 17 tahun sejak invasi Amerika Serikat ke Irak, pemerintah Amerika Serikat telah gagal menjadi mitra Irak dalam rangka mendukung pembangunan demokrasi dan ekonomi di negara Irak. Pemerintah Amerika Serikat hanya terus mengejar kepentingan negaranya dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat Irak dan keamanan negara Irak (Alkinani, 2020).

Dari sisi bantuan dana, sudah sangat banyak dana yang diberikan Amerika Serikat kepada Irak, misalnya dana sebesar \$451 juta untuk bantuan militer ke Irak serta dana sebesar \$745 juta untuk perlawanan *Islamic States of Iraq and Syria* (ISIS) agar Irak dapat menjadi negara yang demokratis dan jauh dari terorisme. Juga pemerintah Amerika Serikat menambahkan dana dalam bantuan kemanusiaan ke Irak sehingga totalnya akan menjadi lebih dari sebesar \$706 juta serta tambahan dana \$49,5 juta dalam bantuan ekonomi COVID-19 dan lebih dari \$22,7 juta untuk membantu pengungsi Suriah di Irak (HRW, 2021).

Bila kita kembali merujuk pada pandangan Dahl (1998) tentang manfaat demokrasi, masih banyak kriteria yang belum terpenuhi, misalnya, pemerintahan demokratis seharusnya dapat menegakkan keadilan, lebih menghormati kepentingan dasar rakyat, mampu menjamin hak-hak dasar rakyat, dan mampu membantu rakyat dalam melindungi kepentingan fundamental mereka sendiri. Di antara hak dasar rakyat adalah keamanan dan kemakmuran; namun hal ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Irak.

Alih-alih Irak dapat menjadi negara demokratis, Irak hingga kini masih berada dalam konflik berkepanjangan, antara lain masih bergeraknya sel-sel *Islamic States of Iraq and Syria* (ISIS) yang melakukan berbagai aksi teror, masih terjadinya konflik internal di Irak, bahkan serangan bersenjata yang saling membalas antara militer Amerika Serikat melawan milisi sukarelawan rakyat Irak yang menginginkan Amerika Serikat angkat kaki sepenuhnya dari Irak, yang mana serangan ini juga berdampak pada keamanan masyarakat Irak. Seperti yang terjadi pada saat itu, ketika milisi sukarelawan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Provinsi Anbar barat dan ibu kota Baghdad dengan delapan tembakan (Weekly, 2022). Kemudian, Amerika Serikat membalas dengan melakukan serangan yang menewaskan Jenderal Iran, Qassem Soleimani, di bandara Baghdad yang pada saat itu datang sebagai diplomat yang diundang resmi oleh pemerintah Irak dan ia merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam perang melawan ISIS (Yulianti, Sidik, & Mu'min, 2021). Iran bersumpah akan membalas dendam atas pembunuhan ini sampai Amerika Serikat keluar dari Irak (Weekly, 2022).

Perkembangan ini telah mengubah Irak menjadi medan pertempuran, dengan konsekuensi yang buruk bagi gerakan politik Irak ke arah perubahan dan demokrasi (Alkinani, 2020).

Liberalisme adalah hal menjadi pemicu Amerika Serikat mewujudkan kebijakan luar negerinya dengan melakukan demokratisasi. Amerika Serikat kita ketahui sebagai negara penganut liberalisme. Namun, tidak semua negara yang menjadi fokus demokratisasi dari Amerika Serikat, khususnya Irak, merupakan penganut liberalisme juga. Tidak semua negara mau menerima demokratisasi ala Amerika Serikat, dan ketika tidak mau, Amerika Serikat akan melakukan penggulingan rezim, seperti apa yang Amerika Serikat lakukan kepada rezim Saddam Hussein (Mearshaimer, 2018).

Sejak berakhirnya Perang Dingin, menurut Mearsheimer, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai hegemoni liberal. Dan tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut ialah untuk membangun negara-negara sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Tapi, kebijakan ini merupakan kegagalan total. Hegemoni liberal ini merupakan kebijakan luar negeri yang sangat ambisius dengan melibatkan tiga tujuan, yaitu untuk mengubah sebanyak mungkin negara menjadi demokrasi liberal, mendorong ekonomi internasional yang terbuka, dan membangun institusi internasional, intinya Amerika Serikat membentuk dunia sesuai dengan citranya sendiri yang ujungnya malah mengorbankan politik bahkan ekonomi negara lain (Mearshaimer, 2018).

Kaum liberal memiliki alasan penting untuk mempromosikan penyebaran demokrasi liberal yaitu untuk memfasilitasi perdamaian. Sama dengan Amerika Serikat yang memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk promosi demokrasi terhadap Irak dan Amerika Serikat juga berkomitmen untuk melindungi dan memfasilitasi perlindungan untuk Irak agar terciptanya perdamaian. Beberapa kaum liberal juga berpendapat bahwa liberalisme akan membantu perdamaian lebih lanjut dengan meningkatkan kemakmuran ekonomi. Dengan berlindung di balik kalimat dari Woodrow Wilson bahwa liberalisme akan membuat dunia aman untuk demokrasi, Amerika Serikat tidak sadar bahwa setiap negara memiliki budaya masing-masing, yang mana dengan memaksakan usahanya yang ambisius itu akan tidak menghargai hak individu Irak dan merusak kebudayaan yang dimiliki oleh Irak (Mearshaimer, 2018:121).

Data menunjukkan bahwa selama masa kependudukan Amerika Serikat di Irak menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat bagi masyarakat Irak. Hingga kini, rakyat Irak masih menderita akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam keterlibatan di Irak, seperti serangan yang membunuh dan melukai warga sipil, penahanan secara rahasia, pemindahan tahanan secara rahasia, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan seperti larangan untuk tidur, kekurangan makanan dan air yang memadai, bahkan ancaman pemerkosaan bagi tahanan. Bahkan hingga saat ini, Irak terperosok

dalam kekerasan dan budaya impunitas yang diwariskan oleh Amerika Serikat, sebab masih ada pelaku pelanggaran HAM dari Amerika Serikat yang belum diadili hingga saat ini. Warisan Amerika Serikat ini terus memakan korban di Irak hingga saat ini (Amnesty, 2023).

Keterlibatan Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak sudah salah dari awal sebab perang bukanlah cara yang benar untuk mendorong pembangunan negara dan bangsa. Perang hanya akan menyebabkan kehancuran bukan hanya terhadap militer, namun juga terhadap rakyat, infrastruktur negara, perekonomian negara, dan juga lingkungan negara tersebut. Perang yang dilakukan dalam operasi pembebasan Irak oleh Amerika justru membawa mengakibatkan kegagalan penciptaan pemerintahan yang baik, populasi yang sejahtera, dan kemajuan perekonomian. Kegagalan Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak juga dapat dilihat dari seberapa buruknya cara Amerika Serikat dalam membangun Irak kembali. Masyarakat Irak sendiri pun tidak dilibatkan dalam pemulihan Irak oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan masyarakat Irak kehilangan hak mereka dalam menentukan nasib bangsa mereka sendiri. Pihak Amerika Serikat sendiri hanya berfokus pada efisiensi yang sebenarnya tidak efektif juga dan menyembunyikan masalah dengan rekonstruksi yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada (Gregg, 2023).

Dengan demikian, sudah seharusnya pengambilan keputusan kebijakan luar negeri terhadap negara lain dipikirkan terlebih dahulu apakah dapat menciptakan hubungan damai atau tidak. Karena pengambilan kebijakan luar negeri seharusnya dilakukan agar negara lain dapat mencapai hasil yang lebih baik, bahkan menciptakan kedamaian pada negara itu, bukan hanya paksaan yang dapat berdampak buruk terhadap negara tersebut, seperti apa yang berdampak pada Irak sebab dari keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya.

## **Simpulan**

Serangan terorisme 9 September 2001 menjadi awal mula kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Irak yang berfokus pada perang melawan terorisme, memusnahkan senjata pembunuh massal, dan demokratisasi di Irak. Namun, seiring waktu, terbukti bahwa tidak ditemukan senjata pembunuh massal di Irak. Meskipun senjata pembunuh massal tidak ditemukan dan presiden Irak, Saddam Hussein sudah terguling, Amerika Serikat tetap berada di Irak dengan memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk demokratisasi Irak. Salah satu lembaga yang menjadi pelaksana kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak adalah *United States Agency for International Development* (USAID). Menurut laporan tahun 2021, USAID masih memberikan dana sebesar \$172 juta untuk mendukung Irak menjadi negara yang demokratis, Namun, pemerintah Irak masih belum bisa menciptakan negara yang demokratis. Yang mana hingga 2021 Irak melakukan pemilu, masih saja ada ketidakadilan yang terjadi sebab

belum adanya kesetaraan politik dalam pemilihan partai, juga masih tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Irak. Sistem peradilan di Irak juga masih belum berfungsi sempurna sehingga terus terjadinya korupsi yang melanda Irak dan menghambat kesejahteraan di Irak. Sedangkan untuk menjadi negara yang demokratis, negara perlu menjamin masyarakatnya kesejahteraan dan dapat mendorong perkembangan rakyatnya.

Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi keamanan di Irak yang terus memburuk pasca pendudukan Amerika Serikat. Bahkan setelah pendudukan Amerika Serikat di Irak sejak tahun 2003, muncul kelompok-kelompok terorisme, yang kelak pada tahun 2013 berkembang menjadi ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Hal ini disebabkan karena metode yang dipilih Amerika Serikat dalam upaya demokratisasi Irak adalah perang yang menyebabkan banyak korban nyawa warga sipil, hancurnya infrastruktur dan perekonomian negara, serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap warga sipil. Amerika Serikat telah memaksa untuk membangun Irak sesuai dengan nilai yang dianutnya, yaitu liberalisme. Irak memiliki budaya sendiri yang tidak bisa dipaksa untuk mengadopsi budaya yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat justru telah membuat Irak mengalami berbagai keterpurukan dan konflik berkepanjangan hingga hari ini.

### Daftar Pustaka

- Alden, C., & Aran, A. (2017). *Foreign Policy Analysis : New Approaches*. New York: Routledge.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.
- Alkifaey, H. (2019). *The failure of democracy in Iraq: religion, ideology and sectarianism*. New York: Routledge.
- Alkinani, Z. (2020, December 14). Biden should not repeat Trump and Obama's mistakes in Iraq. [online] Dalam: <https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/14/iraq-after-trump> [Diakses 10 Maret 2023]
- Amnesty. (2023, March 20). *Iraq: 20 years since the US-led coalition invaded Iraq, impunity reigns supreme*. [online] Dalam: Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/iraq-20-years-since-the-us-led-coalition-invaded-iraq-impunity-reigns-supreme/> [Diakses 15 Juni

- 2023]Alkifaey, H. (2019). *The failure of democracy in Iraq: religion, ideology and sectarianism*. New York: Routledge.
- Alkinani, Z. (2020, December 14). *Biden should not repeat Trump and Obama's mistakes in Iraq*. Diambil kembali dari AL-Jazeera:  
<https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/14/iraq-after-trump>
- Amnesty. (2023, March 20). *Iraq: 20 years since the US-led coalition invaded Iraq, impunity reigns supreme*. Diambil kembali dari Amnesty International:  
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/iraq-20-years-since-the-us-led-coalition-invaded-iraq-impunity-reigns-supreme/>
- BBC. (2004, September 16). *Iraq war illegal, says Annan*. Diambil kembali dari BBC News:  
[http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle\\_east/3661134.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3661134.stm)
- Bush, G. W. (2006, August 22). President Bush Admits Iraq Had No WMDs and 'Nothing' to Do With 9/11. (Reporter, Pewawancara) Diambil kembali dari Democracy Now:  
[https://www.democracynow.org/2006/8/22/president\\_bush\\_admits\\_iraq\\_had\\_no](https://www.democracynow.org/2006/8/22/president_bush_admits_iraq_had_no)
- Bush, G. W. (2008). *Peace in the Middle East*. Diambil kembali dari The White House Archive:  
<https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/mideast/>
- Danisworo, T. G., Utomo, D., & Astuti, D. (2013). Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*, 1-12.
- Duelfer, C. (2004). *Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq's WMD with Adendums*. United States: CIA.
- FreedomHouse. (2021). *Freedom in the World 2021 : Iraq*. Washington DC: Freedom House. Diambil kembali dari Freedom House:  
<https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2021>
- GlobalSecurity. (2004, Mei). *Iraq Survey Group Final Report: Iraq Chemical Warfare Program*. Diambil kembali dari Global Security:  
[https://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/isg-final-report/isg-final-report\\_vol3\\_cw-anx-f.htm](https://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/isg-final-report/isg-final-report_vol3_cw-anx-f.htm)
- Gov. (2006, September 13). *Iraq: Democracy or Civil War?* Diambil kembali dari U.S. Government Printing Office: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109hrg38581/html/CHRG-109hrg38581.htm>
- Gov, S. (2021, June 28). *The Global Coalition To Defeat ISIS*. Diambil kembali dari US Department of State: <https://www.state.gov/the-global-coalition-to-defeat-isis/>

- Gregg, H. S. (2023, March 30). *Operation Iraqi Freedom: Learning Lessons from a Lost War*. Diambil kembali dari FPRI: <https://www.fpri.org/article/2023/03/operation-iraqi-freedom-learning-lessons-from-a-lost-war/>
- GWBushArchives. (2002). *President Bush Holds Press Conference*. United States: The White House George W. Bush Archives. Diambil kembali dari <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/03/20020313-8.html>
- GwbushLibrary. (2003). *Global War on Terror*. Diambil kembali dari George W. Bush Presidential Library and Museum: <https://www.georgewbushlibrary.gov/research/topic-guides/global-war-terror>
- Hamasaeed, S., & Nada, G. (2020, May 29). *Iraq Timeline: Since the 2003 War*. Diambil kembali dari USIP: <https://www.usip.org/iraq-timeline-2003-war>
- Hatif, D. (2021). Political role of social forces in Iraq. *Dirasat: Human and Social Sciences, Volume 48, Issue 3*, 170-188.
- Husain, M. (2023, March 17). *How Iran Won The U.S. War in Iraq*. Diambil kembali dari The Intercept: <https://theintercept.com/2023/03/17/iraq-war-iran-cables/>
- IBC. (2021). *Documented civilian deaths from violence (database)*. Diambil kembali dari Iraq Body Count: <https://www.iraqbodycount.org/database/>
- Liptak, K., & Vazquez, M. (2021, July 26). *Biden announces end of combat mission in Iraq as he shifts US foreign policy focus*. Diambil kembali dari CNN: <https://edition.cnn.com/2021/07/26/politics/joe-biden-iraq/index.html>
- Machlis, E. (2021). Shii-Kurd Relations in Post-2003 Iraq: Visions of Nationalism. *Middle East Policy, Volume 28, Issue 3-4*, 116-132.
- Mearshaimer, J. J. (2018). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. London: Yale University Press.
- Nelson, M. (2023, March 11). *Barack Obama: Foreign Affairs*. Diambil kembali dari Miller Center: <https://millercenter.org/president/obama/foreign-affairs>
- NSA. (2010, September 22). *THE IRAQ WAR PART I: The U.S. Prepares for Conflict, 2001*. Diambil kembali dari The National Security Archives: <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB326/index.htm>
- Obama, B. (2009, February 27). *Remarks of President Barack Obama - Responsibly Ending the War in Iraq*. Diambil kembali dari The White House of Barack Obama: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-ndash-responsibly-ending-war-iraq>
- Obama, B. (2011). *Promise Kept*. Diambil kembali dari The White House of Barack Obama: <https://obamawhitehouse.archives.gov/iraq>

- Obama, B. (2014, September 10). *Statement by the President on ISIL*. Diambil kembali dari The White House of Barack Obama: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1>
- Powell, C. L. (2002, December 12). *The U.S.-Middle East Partnership Initiative: Building Hope for the Years Ahead*. Diambil kembali dari U.S. Department of State Archive: <https://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/15920.htm>
- Rahbarqazi, M., & Mahmoudoghli, R. (2020). Corruption perceptions, political distrust, and the weakening of political islam in Iraq. *Revista Espanola de Sociologia, Volume 29, Issue 3*, 57-74.
- Saputra, E. (2011). *\*Skripsi\* Upaya Etnis Kurdi dalam Mendapatkan Peran Politik di Irak Pasca Rezim Saddam Hussein*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Souli, A. (2019). Sectarianism and Political Order in Iraq and Lebanon. *Studies in Ethnicity and Nationalism, Volume 19, Issue 1*, 67-78.
- Statista. (2023, January 11). *Number of documented civilian deaths in the Iraq war from 2003 to December 2022*. Diambil kembali dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/269729/documented-civilian-deaths-in-iraq-war-since-2003/>
- USAID. (2021). *Democracy & Governance*. Diambil kembali dari USAID: <https://www.usaid.gov/iraq/democracy-governance>
- USAID. (2021). *History of USAID*. Diambil kembali dari United States Agency International Development: <https://www.usaid.gov/iraq/history>
- Weekly, T. A. (2022, January 6). *Pro-Iran militias keep up attacks on US military targets in Iraq, Syria*. Diambil kembali dari The Arab Weekly: <https://thearabweekly.com/pro-iran-militias-keep-attacks-us-military-targets-iraq-syria>
- Yulianti, D., Sidik, H., & Mu'min, M. (2021). International Law Review in the Assasination of General Qasem Soleimani. *Indonesian Journal of International Law Volume 18. No. 4*.